

## PEMKOT SEMARANG BERI BANTUAN KEPADA MANTAN PEMAIN PSIS BUDIONO SUTIKNO



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/pemkot-semarang.jpeg>

### Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memberikan bantuan kesehatan kepada pemain veteran PSIS Semarang, Budiono Sutikno yang menderita penyakit diabetes, Sabtu (28/10/2023).

Saat ini mantan pemain PSIS tersebut mengalami katarak akibat komplikasi dari penyakitnya tersebut. Dirinya juga kesulitan bernapas akibat cedera patah hidung yang dialaminya saat masih aktif menjadi atlet sepak bola.

“Saya sudah minta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengecek kondisi yang bersangkutan beberapa hari yang lalu,” ujar Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam keterangan tertulis.

“Dari Puskesmas pun sudah melakukan cek kesehatan dan sudah membuat rujukan ke Rumah Sakit untuk bisa segera melaksanakan operasi katarak mas Budi,” lanjut Mbak Ita, sapaan akrab perempuan tersebut.

Pada tahun 1994 – 1995, Budi membela PSIS Semarang dalam Divisi Utama Liga Indonesia atau Liga Indonesia I (Ligina I). Ligina I adalah musim dimulainya Liga Indonesia pascapenggabungan kompetisi Perserikatan dan Galatama dengan nama Liga Dunhill.

Kini Budi tinggal bersama kedua anaknya di rumah susun, sementara istrinya setahun belakangan mengalami stroke sehingga kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro. Budi tidak berpenghasilan dan untuk kebutuhan sehari-hari selama ini mengandalkan bantuan dari teman-teman mantan sesama atlet.

“Karena itu kami sudah memberikan bantuan uang tunai 1 juta rupiah. Selain itu juga kita berikan dua kasur, dua paket sembako, dan dua selimut,” terang Mbak Ita.

Dia berharap, operasi katarak yang akan dijalani Budi dapat berjalan lancar sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya kembali. Mbak Ita juga memperhatikan anak-anak Budi yang sedang menempuh pendidikan kejar paket C.

“Nanti saya akan bantu bayar sewa rusunnya dan anaknya yang masih sekolah akan disupport biaya pendidikan oleh Pemerintah Kota Semarang,” ujar Mbak Ita.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.solopos.com/pemkot-semarang-beri-bantuan-kepada-mantan-pemain-psis-budiono-sutikno-1780098>, “Pemkot Semarang Beri Bantuan kepada Mantan Pemain PSIS Budiono Sutikno”, tanggal 29 Oktober 2023.
2. <https://halosemarang.id/pemkot-semarang-berikan-bantuan-kepada-mantan-pemain-psis-budiono-sutikno>, “Pemkot Semarang Berikan Bantuan kepada Mantan Pemain PSIS, Budiono Sutikno”, tanggal 29 Oktober 2023.
3. [https://rri.co.id/daerah/421630/pemkot-semarang-beri-bantuan-mantan-pemain-psis?utm\\_source=popular\\_home&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://rri.co.id/daerah/421630/pemkot-semarang-beri-bantuan-mantan-pemain-psis?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), “Pemkot Semarang Beri Bantuan Mantan Pemain PSIS”, tanggal 29 Oktober 2023.

### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*